

Prosedur Perlindungan Saksi di Amerika Serikat

Supriyadi Widodo Eddyono



2005

Pendahuluan

Tulisan ini merupakan tulisan ringkas yang memaparkan sebuah proses pemberian perlindungan terhadap saksi dalam unit khusus perlindungan saksi di Amerika, sumber informasi yang utama dalam tulisan ini adalah buku petunjuk bagi para jaksa dari Departemen Kehakiman (*Department of Justice*) AS mengenai Undang-Undang tentang Reformasi Keamanan Saksi tahun 1984¹, bagian F, Bab XII dari Undang-Undang tentang Kontrol yang Komprehensif atas Kejahatan (Pub. L. No. 98-473).

Peraturan-peraturan ini memberikan informasi umum dan penting mengenai Program Keamanan Saksi (disebut juga dengan Program) dan menetapkan langkah-langkah maupun cara bagaimana jaksa pemerintah bisa mendapatkan layanan dari Program tersebut untuk melindungi seorang saksi dari bahaya yang mungkin ada terkait dengan kesaksian yang diberikannya. Di samping itu peraturan tersebut juga memiliki informasi tentang orang-orang yang berada di bawah perlindungan Kantor *United States Marshals Service* at, Biro Tahanan (*Bureau of Prison*) atau yang ada di bawah pengawasan Biro Tahanan dapat dilibatkan dalam investigasi (menjadi orang yang diinvestigasi)

Prosedur (langkah-langkah) yang akan dijelaskan dalam tulisan berikut ini berlaku bagi semua organisasi yang bernaung di bawah Departemen Kehakiman dan semua organisasi yang memanfaatkan Program Keamanan Saksi atau berkepentingan dengan orang-orang yang berada di bawah perlindungan Kantor US Marshals Service atau Bureau of Prison. Divisi Kriminal dari Kantor Operasi Penegakan bertugas mengawasi program-program ini.

Prosedur Investigasi.

Permohonan untuk melibatkan -untuk tujuan investigasi orang-orang di bawah perlindungan atau pengawasan Bureau of Prison atau US Marshals Service harus disampaikan kepada Kantor

¹ Undang-Undang tentang Reformasi Keamanan Saksi tahun 1984 (disebut juga dengan UU) memperluas kewenangan Jaksa Agung. Kewenangan ini diberikan sebagai bagian dari UU tahun 1970 tentang Kontrol atas Kejahatan Terorganisir yang dimaksudkan menyediakan perlindungan dan jaminan keamanan dengan cara memindahkan (*relocation*). Yang diberi perlindungan atau jaminan ini adalah orang-orang yang bersaksi dalam pengadilan atas orang-orang yang terlibat dalam kegiatan kriminal yang terorganisir atau kejahatan serius lainnya dimana dilihat kemungkinan bahwa saksi tersebut akan mengalami kejahatan seperti terdapat dalam judul 18 Kitab Pidana AS bab 73 (tentang menghalangi proses keadilan) atau kejahatan sejenis yang mengandung kekerasan. Undang-Undang tersebut juga menetapkan wewenang yang bisa dipakai oleh Jaksa Agung untuk menyediakan bantuan perlindungan bagi famili dan kerabat dari saksi yang dilindungi. Untuk hal ini, judul 28 Kitab Pidana AS bab 524 membenarkan penggunaan dana simpanan Departemen Kehakiman untuk membayar biaya kompensasi dan biaya-biaya bagi para saksi sejumlah yang dibenarkan oleh disetujui oleh Asisten Jaksa Umum untuk Administrasi.

Prosedur Pemberian Perlindungan Saksi di Amerika Serikat

Operasi Penegakan² untuk diteliti dan disetujui.³ Sebagai bagian dari proses penelitian atas permohonan itu, Kantor Operasi Penegakan berkordinasi dengan pejabat kantor pusat dari badan-badan yang terkait (Biro Tahanan, Kantor Marsekal AS, badan-badan investigasi). Setelah menolak atau menerima permohonan dimaksud, Kantor Operasi Penegakan juga harus memberi pengarahan kepada kantor pusat lembaga pemohon tentang putusan tersebut.

Jika dalam sebuah situasi yang sangat mendesak sehingga diperlukan tanggapan segera dari Kantor Operasi Penegakan, permohonan yang berbentuk lisan untuk mendapat persetujuan oleh pejabat di kantor pusat lembaga pemohon dapat diterima. Akan tetapi, penegasan tentang permohonan itu dan informasi pendukung yang terkait harus disampaikan kepada Kantor Operasi Penegakan secara tertulis segera setelah adanya persetujuan. Informasi yang disampaikan tersebut akan sangat dirahasiakan; oleh karena itu informasi tersebut tidak akan disebarluaskan tanpa lebih dahulu mendapat persetujuan dari pejabat berwenang di kantor pusat lembaga pemohon itu.

Kendati tidak dianjurkan, jika dalam keadaan khusus dapat dibenarkan juga keikutsertaan seseorang yang ada di bawah perlindungan Bureau of Prison dan Kantor Marsekal AS oleh suatu badan penegakan hukum lokal atau negara. Kantor Operasi Penegakan akan mempertimbangkan permohonan itu. Permohonan seperti itu harus disampaikan secara tertulis dan disetujui oleh Jaksa AS di distrik mana investigasi tersebut akan dilakukan atau oleh Jaksa dimana tuntutan itu akan diajukan tergantung mana dari keduanya yang lebih tepat.

Jika Kantor Operasi Penegakan telah menyetujui suatu permohonan, sementara orang yang akan dilibatkan dalam investigasi tersebut masih ditahan oleh US Marshals Service atau Bureau of Prison *atas perintah pengadilan*, Asisten Jaksa AS mesti mendapatkan perintah pengadilan yang membenarkan pembebasan dari perlindungan US Marshals Service dan Bureau of Prison untuk diserahkan kepada badan investigasi yang telah disetujui.

Pengadilan harus merahasiakan perintah seperti itu demi keamanan si tahanan dan investigasi tersebut. Tidak mungkin diperoleh perintah pengadilan untuk mengalihkan perlindungan seseorang dari Kantor Marsekal AS atau Biro Tahanan kepada suatu badan investigasi tanpa terlebih dahulu disetujui oleh Kantor Operasi Penegakan.⁴ Selain itu, kasus-kasus menyangkut

² Kantor Operasi Penegakan dalam tulisan ini adalah Unit Khusus dalam Departemen of Justice (departemen kehakiman AS) yang berada dalam divisi kriminal. Dalam hal ini kantor operasi penegakan yang mengatur dan mengawasi program perlindungan saksi

³ Permohonan seperti itu harus terlebih dahulu disetujui oleh pejabat berwenang di kantor pusat lembaga pemohon itu dalam hal ini adalah Jaksa AS. Kemudian, pejabat dari kantor pusat itu menyampaikannya secara tertulis kepada Ketua Unit Operasi Khusus, Kantor Operasi Penegakan, Divisi Kriminal di Departemen Kehakiman AS.

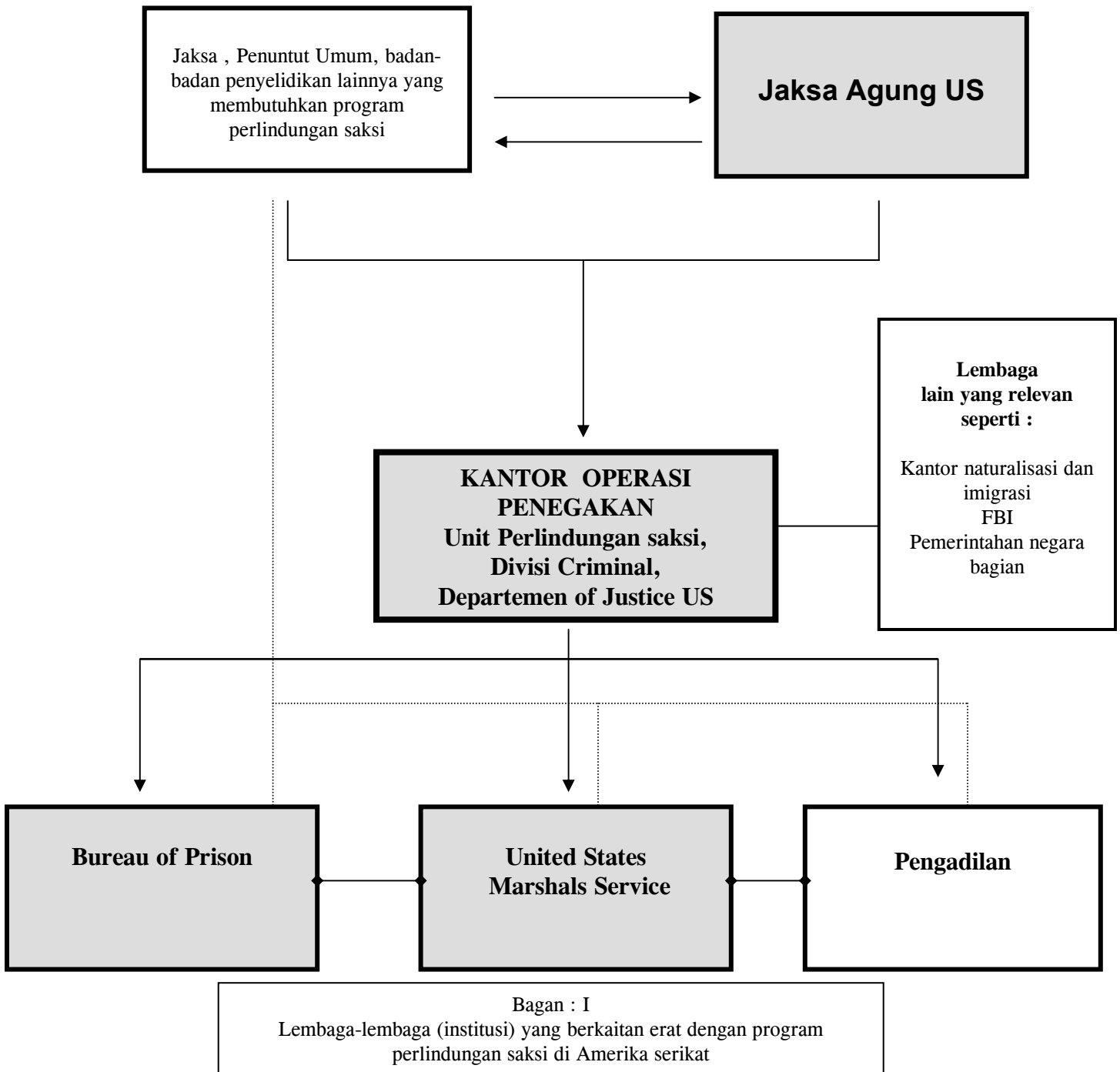
⁴ Sebagai Catatan: badan-badan investigasi Federal juga harus mendapatkan persetujuan Kantor Operasi Penegakan untuk melibatkan atau menginvestigasi karyawan Bureau of Prison yang sedang dalam penyamaran. (Lihat Buku Pegangan Kriminal bagian

Prosedur Pemberian Perlindungan Saksi di Amerika Serikat

pengawasan lewat video dan atau pengawasan yang disepakati harus tunduk juga terhadap Undang-undang tentang Pengawasan Elektronik

704 untuk penjelasan tambahan tentang pelibatan karyawan Bureau of Prison) Lihat Buku Buku Pegangan itu bagian 703 untuk penjelasan lebih terperinci tentang informasi yang harus disampaikan ke Kantor Operasi Penegakan.

Prosedur Pemberian Perlindungan Saksi di Amerika Serikat



Syarat Mendapatkan Program Keamanan Saksi

Untuk mempermudah pengurusan permohonan yang diajukan oleh Jaksa Pemerintah untuk mengikutsertakan seorang saksi dalam Program Keamanan Saksi⁵, Unit Keamanan Saksi pada Kantor Operasi Penegakan telah menyiapkan suatu formulir permohonan yang mensyaratkan informasi tertentu untuk mendukung suatu permohonan.⁶ Sebagian besar informasi tersebut telah dirumuskan dalam UU tentang Reformasi Keamanan Saksi dimana Jaksa Agung harus mendapatkan dan mengevaluasi semua informasi yang diberikan mengenai pengikutsertaan seorang saksi ke dalam Program. Informasi ini meliputi ancaman yang dialami saksi, riwayat kriminal saksi (bila ada), penilaian psikologis atas saksi dan setiap identitas menyangkut anggota rumah tangganya yang telah dewasa (berumur 18 tahun atau lebih) yang akan diikutsertakan ke dalam Program.

Selain itu, Jaksa Agung diwajibkan juga untuk membuat sebuah penilaian tertulis atas resiko yang mungkin diderita suatu komunitas dimana saksi dan anggota keluarganya yang sudah dewasa akan dipindahkan. Faktor-faktor yang mesti dievaluasi dalam penilaian tentang resiko ini meliputi, catatan kriminal, kemungkinan serta alternatif lain (selain mengikutsertakan dalam Program perlindungan) dan kemungkinan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari sumber lain. Jika diyakini bahwa ada bahaya (resiko) yang lebih besar yang akan diterima oleh bagi suatu komunitas (tempat dimana saksi dan anggota keluarganya yang dewasa dipindahkan) ketimbang pentingnya memulai persidangan dari suatu kasus maka Jaksa Agung dapat diminta untuk mengeluarkan saksi dari Program Keamanan Saksi.

Sebelum secara resmi masuk ke dalam Program, saksi-saksi akan diwajibkan membayar semua hutang yang dapat dibuktikan keberadaannya secara valid atau membuat perencanaan yang menyakinkan untuk membayarnya, membereskan semua kewajiban di bidang pidana maupun perdata (misalnya: denda, kewajiban kepada komunitas, restitusi), menyiapkan dokumen-

⁵ Seorang saksi dapat diterima untuk masuk dalam Program Keamanan Saksi jika dia adalah saksi inti dari kasus khusus dalam tipe-tipe berikut: (a) tiap kejahatan yang dirumuskan dalam Judul 18, Kitab Hukum Pidana AS, Bagian 1961 (1) (tentang Kejahatan terorganisir dan Pemasaran); (b) tiap kejahatan perdagangan obat bius sebagaimana dirumuskan dalam Judul 21, Kitab Hukum Pidana AS; (c) tiap kejahatan di negara bagian manapun yang pada hakekatnya mirip dengan yang disebut di atas; (d) persidangan-persidangan sipil dan administratif tertentu dimana ada kemungkinan bahwa kesaksian yang diungkapkan seorang saksi dapat membahayakan keselamatan saksi itu.

⁶ Formulir ini mensyaratkan adanya ringkasan dari kesaksian yang akan diungkapkan oleh saksi dan informasi lain yang membuktikan kerjasama yang dilakukan oleh saksi, ancaman yang dialami saksi, kemungkinan resiko yang diderita oleh suatu komunitas dimana saksi tersebut akan dipindahkan. Jaksa bisa mendapatkan formulir permohonan dan petunjuk mengenai pengikutsertaan seorang saksi ke dalam Program Keamanan Saksi (disebut juga Program) dari : Unit Keamanan Saksi, Divisi Kriminal, Kantor Operasi Penegakan Departemen Kehakiman AS P.O. BOX 7600 Washington, D.C. 20044-7600 Atau hubungi nomor : (020) 514-3684

Prosedur Pemberian Perlindungan Saksi di Amerika Serikat

dokumen pemeliharaan anak yang tepat, dan menyediakan dokumen-dokumen imigrasi yang tepat jika diperlukan.

Selain itu, agar seorang saksi diterima resmi ke dalam Program, Departemen Kehakiman boleh (bila dianggapnya perlu) memberitahu badan penegak hukum lokal tentang keberadaan saksi dalam suatu komunitas dan riwayat kriminalnya, mewajibkan dilakukannya tes obat bius dan alkohol dan/atau konseling tentang penyalahgunaan obat-obatan, dan menetapkan syarat-syarat lain yang dipercaya akan sangat berguna bagi Program.

Untuk menghindari penundaan yang tidak penting dalam memproses suatu permohonan untuk masuk dalam Program, Jaksa Pemerintah sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut: Pertama, untuk memastikan agar permohonan seorang saksi untuk masuk ke dalam Program benar-benar sesuai dan tepat waktu, maka sebelum diterima ke dalam Program, saksi harus hadir atau bersaksi di hadapan dewan juri atau dengan cara tertentu bersumpah bahwa dia akan bersaksi di persidangan. Syarat ini terkait dengan komitmen saksi untuk bersaksi dan dimaksudkan untuk memastikan bahwa kesaksian saksi tersebut akan tersedia pada saat persidangan. Syarat yang juga sama pentingnya adalah bahwa Penuntut Umum menginginkan si saksi untuk bersaksi dan bahwa kesaksiannya benar-benar mendasar dan penting untuk suksesnya persidangan.

Kedua, perlindungan atau pemindahan saksi dan anggota keluarganya adalah pekerjaan yang mahal dan rumit. Selain itu, Departemen Kehakiman wajib menjamin keselamatan dan kesejahteraan saksi yang dilindungi dan anggota keluarganya dalam waktu yang lama sesudah saksi memberi kesaksian. Oleh karena itu, sudah seharusnya Jaksa yang mendukung masuknya seorang saksi ke dalam Program hanya sebaiknya membuat permohonan setelah memastikan bahwa kesaksian dari saksi itu benar-benar mendasar dan penting untuk suksesnya persidangan.

Informan

Keselamatan seorang informan yang membantu dalam suatu investigasi menjadi tanggung jawab badan investigasi yang melibatkannya. Seorang informan hanya dapat diikutsertakan dalam Program Keamanan Saksi jika dia juga benar-benar seorang saksi sebagaimana diatur dalam Judul 18, Kitab Hukum Pidana AS, bagian 3521. Harus diperhatikan juga bahwa meminta seorang informan untuk bersaksi sekedar untuk membuatnya diterima dalam Program bukanlah merupakan alasan yang memadai. Dia tetap saja harus memenuhi persyaratan sebagai saksi yang penting dan mendasar.

Narapidana sebagai Saksi

Para narapidana di institusi Federal atau Negara Bagian dimungkinkan untuk diikutsertakan dalam Program Keamanan Saksi jika semua persyaratan dipenuhi. Jika si narapidana berada di bawah perlindungan Negara Bagian, Negara Bagian harus mengizinkan narapidana itu melewati masa tahanannya di bawah perlindungan Bureau of Prison.

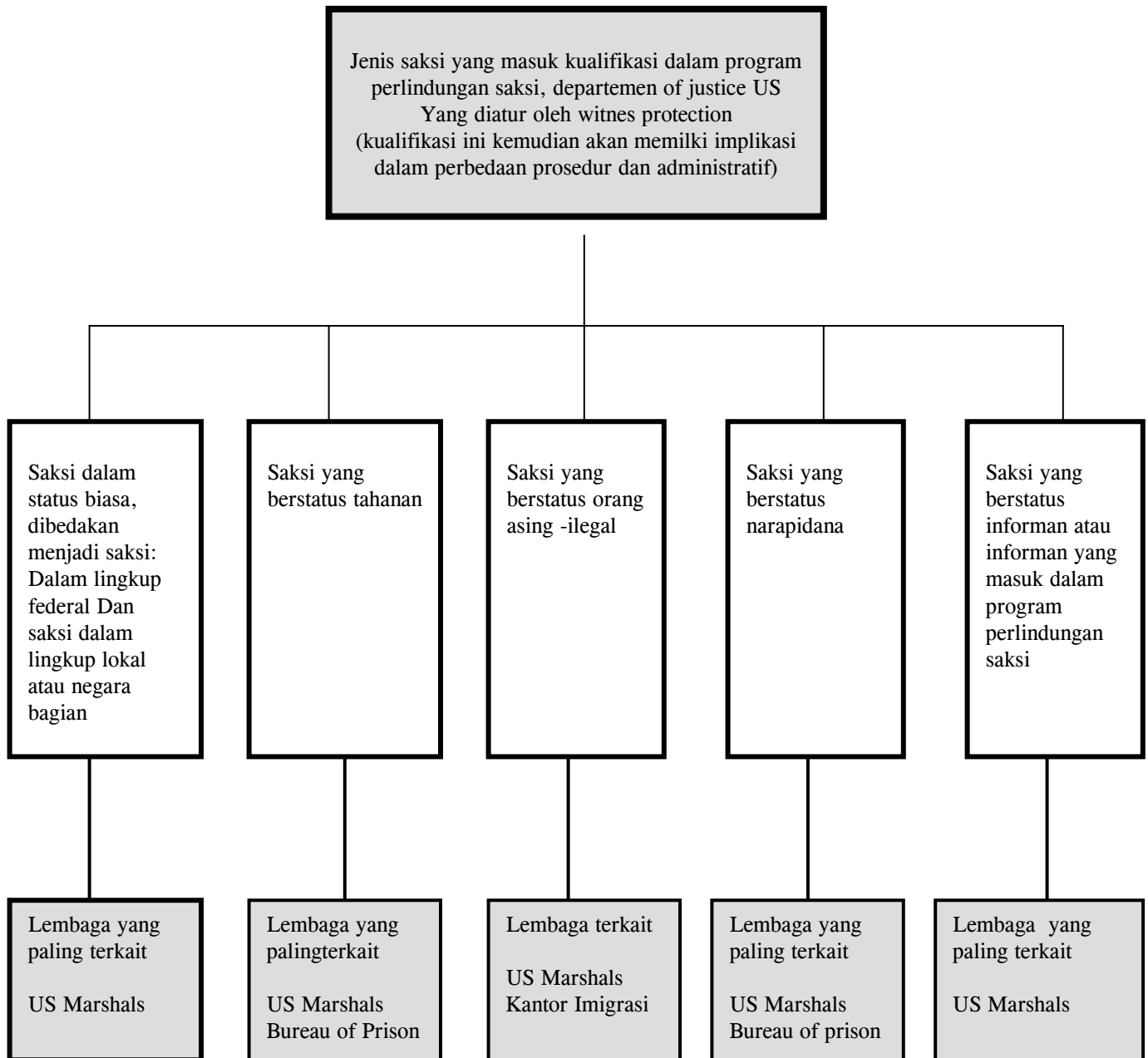
Permohonan harus dibuat sesuai dengan yang ditentukan bagi saksi-saksi lainnya. Akan tetapi, tidak diperlukan suatu penilaian tentang resiko bagi masyarakat, kecuali jika saksi itu akan

Prosedur Pemberian Perlindungan Saksi di Amerika Serikat

dipindahkan ke suatu komunitas. Oleh karena itu, tidak diperlukan juga evaluasi psikologis maupun penilaian tentang resiko bagi masyarakat (yang biasa dilakukan oleh Jaksa yang mencalonkan atau badan investigasi).

Wawancara pendahuluan tidak perlu dilakukan oleh US Marshals Service jika narapidana tersebut belum sampai enam hingga sembilan bulan dibebaskan atau jika sedang dipertimbangkan untuk mendapat layanan penuh dari Program termasuk pemindahan. Jika

Prosedur Pemberian Perlindungan Saksi di Amerika Serikat



Prosedur Pemberian Perlindungan Saksi di Amerika Serikat

dibuat permohonan untuk memindahkan keluarga narapidana sementara si narapidana masih ditahan, diperlukan adanya evaluasi psikologis dan penilaian tentang resiko bagi semua anggota keluarga yang dewasa. Perlu juga diperlihatkan bahwa untuk saat ini tidak ada alternatif lain, selain mengikutsertakan keluarga itu ke dalam Program.

Saksi Lokal dan Negara Bagian

Undang-Undang tahun 1984 tentang Reformasi Keamanan Saksi memberi wewenang kepada Jaksa Agung untuk menyediakan perlindungan bagi saksi Lokal dan Negara Bagian. Jika ada permohonan seperti itu, Negara Bagian bersangkutan diminta untuk membayar kepada Amerika Serikat biaya yang telah terpakai dalam melakukan perlindungan dan diminta juga untuk bersedia bekerjasama dengan Jaksa Agung dalam menerapkan ketentuan-ketentuan dalam UU tentang Reformasi Keamanan Saksi.

Syarat-syarat dalam perjanjian pembayaran ini akan ditentukan oleh Kantor US Marshals Service. Jika saksi lokal atau Negara Bagian berada di bawah pengawasan lokal atau Negara Bagian, badan pengawasnya itu mesti setuju untuk memindahkan yurisdiksi dan pengawasan tersebut kepada lembaga pengawasan federal, sebelum saksi tersebut diikutsertakan dalam Program Keamanan Saksi.

Permohonan dari pemerintah lokal atau Negara Bagian mesti ditujukan kepada Jaksa AS yang tepat dan mesti memuat semua informasi yang umumnya diminta dalam permohonan menjadi saksi Federal dalam Program Keamanan Saksi. Jaksa AS mesti memeriksa permohonan tersebut dan menyampaikan rekomendasinya kepada Kantor Operasi Penegakan untuk dipertimbangkan.

Wewenang Mengesahkan dari Jaksa Agung.

Undang-Undang tentang Reformasi Keamanan Saksi mengatur bahwa Jaksa Agung boleh mendelegasikan wewenang untuk mengikutsertakan seseorang dalam Program Keamanan Saksi kepada wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda, Asisten Jaksa Agung Divisi Hak-Hak Sipil dan Pidana, dan orang lain.

Dengan Surat Perintah, Jaksa Agung dapat menunjuk nama orang-orang yang disebutkan di atas dan Direktur Senior dari Kantor Operasi Penegakan untuk mengesahkan permohonan saksi atau yang mungkin menjadi saksi untuk diikutsertakan dalam Program. Jika Direktur Senior berhalangan, Direktur Kantor Operasi Penegakan berwenang menggantikan wewenangnya.

Badan investigasi dan Jaksa pemerintah tidak memiliki wewenang untuk mewakili saksi dalam hal dana, perlindungan, atau layanan-layanan lain dari Program Keamanan Saksi, termasuk keikutsertaan dalam Program. Keterwakilan atau kesepakatan-kesepakatan, termasuk yang termuat dalam kesepakatan permohonan saksi, yang terkait dengan Program tidak sah dan tidak akan diakui tanpa persetujuan khusus dari Kantor Operasi Penegakan.

Pengesahan Darurat bagi saksi yang dilindungi

Perlindungan bagi seorang saksi yang pemindahannya sedang dimohonkan tetap merupakan tanggungjawab lembaga investigasi yang memohonkannya sampai waktu ketika (a) Kantor Operasi Penegakan telah memeriksa permohonan dan semua informasi lainnya yang relevan (termasuk hasil pemeriksaan psikologis), (2) Kantor Operasi Penegakan telah mengabulkan pengikutsertaan saksi dalam Program Keamanan Saksi, dan (3) Kantor US Marshals service telah mendapatkan kesempatan untuk mengatur pemindahan yang aman bagi saksi dan anggota keluarganya.

Jika dinilai bahwa seorang saksi menghadapi bahaya kejahatan yang dalam waktu dekat dapat terjadi sementara badan investigasi tidak mampu menyediakan perlindungan yang dibutuhkan, Program perlindungan darurat boleh disetujui oleh Kantor Operasi Penegakan dan disediakan oleh Kantor US marshals Service sebelum dilengkapinya penilaian mengenai resiko secara tertulis dan sebelum semua pihak terkait menandatangani Nota Kesepahaman (MoU).

Akan tetapi, sebelum perlindungan darurat ini diberikan, Kantor Marsekal AS harus terlebih dahulu melakukan interview pendahuluan untuk memastikan bahwa tidak ada hambatan untuk melakukan pemindahan sementara buat saksi. Penilaian resiko dan Nota Kesepahaman tersebut harus sedapat mungkin segera dilengkapi menyusul dilaksanakannya perlindungan darurat.

Permohonan untuk Wawancara Pendahuluan

Setelah menerima permohonan untuk Program Keamanan Saksi, Kantor Operasi Penegakan akan memfasilitasi agar Kantor US marshals service mewawancarai calon saksi sebagai bagian dari proses penelitian terhadap permohonan tersebut. Karena pentingnya wawancara pendahuluan ini, maka sudah seharusnya bahwa Kantor Operasi Penegakan menerima permohonan pengikutsertaan saksi ke dalam Program segera setelah jelas bahwa orang tersebut (1) benar-benar merupakan saksi kunci, (2) menghadapi bahaya, dan (3) butuh diikutsertakan ke dalam Program.

Wawancara Pendahuluan Kantor US Marshals Service ini dirancang agar seorang saksi dapat memperoleh gambaran umum tentang garis-garis besar Program dan layanan-layanan yang saksi dapat harapkan atau tidak dapat harapkan untuk diperoleh. Wawancara ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat sadar akan hal-hal yang harus dibereskan sebelum pengesahan Program dan sebelum pemindahan.

Kantor US Marshals Service akan mengkoordinasikan wawancara pendahuluan ini dengan Penuntut Umum atau lembaga investigasi. Kantor US Marshals Service dapat meminta (berhak) untuk mendapatkan salinan permohonan dan penilaian tentang ancaman terhadap saksi sebelum atau pada saat wawancara yang sudah dijadwalkan. Sebelum menyerahkan salinan hasil penilaian tentang ancaman, lembaga investigasi yang terkait mesti menghubungi kantor pusat Program Keamanan Saksi jika ada petunjuk-petunjuk khusus yang harus diikuti.

Tes dan Evaluasi Psikologis

Sebelum mengesahkan pengikutsertaan saksi ke dalam Program Keamanan Saksi, Kantor Operasi Penegakan akan menyelenggarakan tes dan evaluasi psikologis bagi calon saksi dan bagi semua anggota keluarga saksi yang sudah dewasa (18 tahun atau lebih) yang juga akan dilindungi. Sedapat mungkin, tes ini akan menentukan apakah orang-orang itu dapat menimbulkan bahaya bagi komunitas kemana mereka akan dipindahkan.

Ada kemungkinan laporan psikolog ini memuat informasi yang jika diberikan dalam sidang dimana saksi akan bersaksi berpotensi sebagai alasan pemaaf atas tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena itu, semua bahan dari para psikolog yang melakukan tes tersebut akan dikirimkan oleh Kantor Operasi Penegakan kepada Kantor Kejaksaan AS untuk diperiksa.

Sebelum menjalani evaluasi psikologis, saksi harus menandatangani formulir pembebasan yang memberi wewenang kepada Departemen Kehakiman untuk menggunakan hasil evaluasi psikologis ini untuk proses penerimaan ke dalam Program dan untuk tujuan-tujuan hukum lain. Jaksa atau badan yang memilih saksi bertanggungjawab agar saksi tersebut telah menandatangani formulir pembebasan sebelum dilaksanakannya evaluasi.

Pemeriksaan Poligrap bagi Calon Saksi-Narapidana.

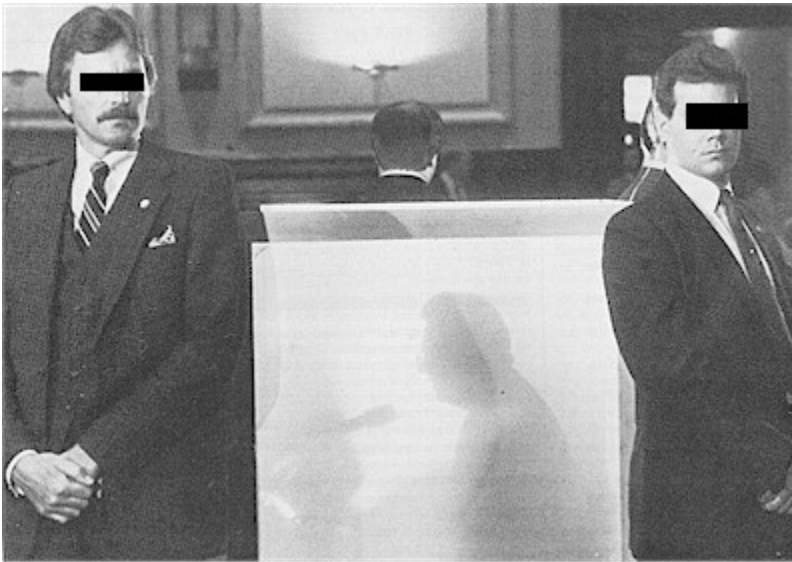
Pemeriksaan poligrap diperlukan bagi calon Program Keamanan Saksi yang masih berstatus narapidana untuk menjamin keamanan orang-orang yang sekarang atau di kemudian hari berada di bawah Unit Perlindungan, Biro Tahanan. Penerimaan ke dalam Program dapat ditunda atau ditolak jika hasil pemeriksaan poligrap memperlihatkan bahwa calon yang bersangkutan bermaksud mencederai saksi-saksi lain yang dilindungi atau membeberkan informasi yang diperoleh dari saksi-saksi tersebut.

Saksi-narapidana calon peserta Program akan diminta menandatangani formulir pemeriksaan poligrap dimana dia mengakui kesediaannya secara sukarela untuk menjalani pemeriksaan. Sedangkan formulir pembebasan yang ditandatangani memberi wewenang kepada Departemen Kehakiman untuk menggunakan hasil pemeriksaan poligrap sejauh dianggap perlu untuk hal-hal yang terkait dengan permohonan saksi untuk diikutsertakan dalam Program dan untuk tujuan-tujuan hukum lain.

Badan investigasi/Penuntut Umum bertanggungjawab menjelaskan persyaratan ini kepada calon peserta Program Keamanan Saksi sebelum menyampaikan permohonan kepada Kantor Operasi Penegakan. Tergantung pada lokasi dimana saksi berada dan karena faktor-faktor terkait lainnya, Penuntut Umum/Badan Investigasi atau Bureau of Prison akan diminta membagikan formulir itu kepada narapidana bersangkutan. Setelah seorang narapidana menjalani pemeriksaan poligrap, lembaga yang melakukan pemeriksaan akan menyiapkan dan menyampaikan laporan ke Kantor Operasi Penegakan.

Langkah-Langkah untuk Menjamin Perlindungan

Permohonan untuk perlindungan bagi seorang saksi harus dibuat segera setelah diketahui bahwa calon untuk Program Keamanan Saksi tersebut benar-benar akan menjadi saksi penting dan membutuhkan pemindahan. Karena menyangkut keamanan saksi (keluarganya), penundaan atau keikutsertaan saksi di dalam Program **tidak boleh** dipublikasikan tanpa lebih dahulu disetujui oleh Kantor Operasi Penegakan.



Setiap Jaksa AS, Asisten Jaksa AS dan badan-badan investigasi wajib menyampaikan sesegera mungkin kepada Kantor Operasi Penegakan permohonan untuk mengikutsertakan seseorang ke dalam Program. Hal ini akan memberi kesempatan untuk wawancara pendahuluan oleh Kantor US Marshals Service, tes psikologis, pemeriksaan yang cukup, dan penyiapan bantuan oleh Kantor US Marshals Service dan/atau Bureau of Prison. Dengan demikian tidak terjadi penundaan yang tidak perlu bagi saksi dan badan-badan pemerintah terkait lainnya.

Jaksa AS dan Jaksa Divisi Pidana/Kriminal harus mengirimkan permohonan ke Kantor Operasi Penegakan. Semua komunikasi mesti ditujukan kepada Ketua Unit Keamanan Saksi, Kantor Operasi Penegakan, atau mengirimkan faksimili ke Kantor Operasi Penegakan (Karena alasan keamanan, dokumen berisi informasi yang sensitif jangan dikirim lewat e-mail ke Kantor Operasi Penegakan). Permohonan untuk masuk Program harus ditandatangani oleh Jaksa AS atau, dalam hal Jaksa AS berhalangan dan sesuai dengan 28 C.F.R. bagian 0.131, Jaksa yang sedang bertugas. Untuk kasus-kasus yang sedang ditangani oleh Divisi Pidana/Kriminal, permohonan itu harus ditandatangani oleh Ketua Divisi/Direktur Kantor. Semua divisi, badan, atau lembaga-lembaga lain yang mengajukan permohonan untuk menggunakan Program harus menghubungi Kantor Operasi Penegakan untuk informasi permohonan dan petunjuk-petunjuk lainnya.

Orang Asing yang Ilegal.

Sewaktu mengajukan permohonan untuk mengikutsertakan orang asing ilegal ke dalam Program Keamanan Saksi, Jaksa atau badan investigasi yang mengajukannya harus mendapatkan dari Kantor Naturalisasi dan Imigrasi dokumen-dokumen yang sesuai untuk membenarkan calon saksi tersebut dan anggota keluarganya untuk tetap berada di AS. Dokumen-dokumen itu juga berfungsi untuk memungkinkan Kantor Marsekal AS memindahkan mereka dari Negara Bagian dimana sebelumnya mereka terdaftar.

Kantor US Marshals tidak dapat memindahkan calon peserta Program yang berstatus orang asing yang ilegal sebelum Kantor Operasi Penegakan atau Kantor US Marshals Service mendapatkan dokumen yang dibutuhkan dan semua persyaratan dari Kantor Naturalisasi dan Imigrasi dipenuhi. Jika prosedur di Kantor Naturalisasi dan Imigrasi untuk melegalisasi status orang asing membutuhkan waktu yang cukup lama, badan yang mengusulkan harus mendapatkan dari Kantor Naturalisasi dan Imigrasi surat keterangan yang mengubah status orang asing sebagai bagian persyaratan untuk memindahkannya sesuai ketentuan Program.

Jika orang asing ilegal itu tidak membutuhkan bantuan perlindungan dari Kantor US Marshals, tetapi tetap butuh tinggal di AS, Jaksa Pemerintah yang mengajukannya harus memohonkan baginya Visa tipe S daripada mencari bantuan dari Program Keamanan Saksi.

Tanggungjawab dan Hak Istimewa US Marshals Service

Jika sudah dipastikan bahwa seorang saksi adalah calon yang tepat untuk diikutsertakan dalam Program Keamanan Saksi, saksi bersangkutan dan anggota keluarganya yang dewasa dan akan dilindungi diminta untuk menandatangani Nota Kesepahaman (MoU). Kantor US Marshals berkewajiban memastikan bahwa tiap komitmen terdokumentasikan selama saksi bersangkutan masih berada di dalam Program. Kantor US Marshals tidak wajib menyediakan fasilitas atau layanan-layanan yang tidak tertera dalam dokumen. Demikian juga saksi bersangkutan berkewajiban melaksanakan komitmennya yang telah tertera dalam dokumen tersebut.



Saksi-Narapidana

Narapidana yang bersedia bekerjasama di luar kerangka Program (tidak atau tidak akan diikutsertakan dalam Program Keamanan Saksi). Penuntut Umum, Asisten Jaksa AS atau Jaksa Divisi yang menangani kasus tersebut bertanggungjawab memberitahukan kepada kantor regional Biro Tahanan tempat narapidana Federal tersebut ditahan dan kepada sipir penjara tempat narapidana tersebut ditahan. Pemberitahuan tersebut berisikan perihal, pertama, kerjasama narapidana tersebut dengan pemerintah, dan kedua, mencakup nama atau deskripsi narapidana-narapidana lainnya (dari siapa narapidana tersebut akan dipisahkan)

Jika narapidana tersebut berada dalam perlindungan otoritas lokal atau Negara Bagian, pemberitahuan disampaikan pejabat tertinggi di lembaga dimana narapidana itu ditahan. Jika narapidana itu adalah narapidana Federal di bawah perlindungan otoritas lokal, pemberitahuan disampaikan kepada Kantor Marsekal AS dan Manager Perbaikan Masyarakat, Biro Tahanan yang di distrik yang menjatuhkan hukuman kepada narapidana itu.

Penuntut Umum menyampaikan kepada Biro Tahanan informasi berikut:

1. Nama pelaku kejahatan
2. Tanggal lahir
3. Ras dan Jenis Kelamin
4. Narapidana Negara Bagian atau Federal (kalau Negara Bagian, beritahukan apakah dibiayai oleh Negara Bagiannya atau tidak)
5. Kejahatan yang dilakukan
6. Hukuman yang diterima (dan nama hakimnya)
7. Lembar laporan dari FBI
8. Surat Tahanan atau nama orang yang menangkapnya
9. Nama orang-orang dari siapa narapidana bersangkutan akan dipisahkan, data biografis mereka, daftar FBI, dan lokasi saat ini.
10. Investigasi sebelum dihukum dan/atau bahan-bahan yang menyatakan jenis hukuman yang didakwakan.
11. Putusan dan dokumen tentang komitmen, dan
12. Status penyelesaian hutang.

Program Keamanan Saksi bagi Saksi-Narapidana.

Segera setelah seorang narapidana mulai bekerjasama, jika dia berada di bawah perlindungan Bureau of Prison, Penuntut Umum atau badan investigasi bertanggungjawab untuk memberitahukan kepada pejabat di lembaga mana narapidana itu ditahan mengenai kebutuhan pengamanan bagi narapidana tersebut. Hal ini untuk memastikan bahwa tindakan pengamanan dalam rangka pencegahan yang memadai sudah dilakukan sebelum saksi diikutsertakan dalam Program. Informasi ini mesti memuat nama orang-orang atau kelompok dari mana narapidana tersebut akan dipisahkan dan tingkat bahaya yang mengancam saksi tersebut.

Prosedur Pemberian Perlindungan Saksi di Amerika Serikat

Setiap permintaan khusus, misalnya seorang saksi ingin agar diangkut dengan alat transportasi seorang diri, sebaiknya harus dikomunikasikan. Jika narapidana tersebut berada di bawah perlindungan otoritas lokal atau Negara Bagian, Penuntut Umum atau badan investigasi bertanggungjawab mengambil tindakan yang selayaknya demi keamanan narapidana tersebut dengan menghubungi pejabat tertinggi di lembaga dimana narapidana tersebut ditahan dan menyampaikan informasi yang telah disebutkan di atas.

Jika dia adalah narapidana Federal di bawah perlindungan otoritas lokal, maka Kantor US Marshals dan Manager Perbaikan Komunitas dari Bureau of Prison harus menyampaikan informasi ke distrik yang menghukum narapidana tersebut. Begitu permohonan untuk Program dimasukkan, Kantor Operasi Penegakan segera memberitahu Bureau of Prison (jika narapidana itu berada di bawah perlindungan Bureau of Prison) tentang permohonan itu sehingga, langkah-langkah pengamanan tambahan yang penting dapat dilakukan.

Kantor Operasi Penegakan akan berkonsultasi dengan Penuntut Umum perihal apakah narapidana tersebut perlu ditempatkan dalam penahanan administratif demi alasan keamanan, apakah ada keberatan tentang pelaksanaan pemeriksaan poligrap dalam rangka Program, dan apakah ada keberatan tentang pelaksanaan wawancara sebelum menyatakan komitmen yang dilaksanakan oleh Biro Tahanan (mirip dengan wawancara pendahuluan Kantor US Marshals).



Photo courtesy of Life Magazine

Memilih lembaga sebagai tempat yang aman dan tepat bagi saksi-narapidana adalah hal yang teramat sulit. Karena itu, semua orang yang diperkirakan akan menimbulkan ancaman bagi narapidana tersebut harus dilengkapi dengan data-data tentang: nama, alias, tanggal lahir, catatan FBI, ras, jenis kelamin, asal-usul etnis, kejahatan/dakwaan, dan faktor-faktor terkait lainnya seperti naik banding atau tidak, pernah melarikan diri atau tidak, tidak ditahan, dll. Informasi ini harus diberikan terlepas apakah narapidana bersangkutan akan ditempatkan di Unit Perlindungan atau di salah satu institusi Federal lainnya. Dengan demikian, Bureau of Prison akan dapat memonitor dengan baik apakah saksi-narapidana bersangkutan perlu dipisahkan atau tidak.⁷

⁷ Informasi ini harus disampaikan juga kepada Bureau of Prison pada saat perlindungan saksi sedang dimohonkan bagi seorang saksi-narapidana

Prosedur Pemberian Perlindungan Saksi di Amerika Serikat

Permohonan untuk menempatkan seorang saksi-narapidana di Unit Perlindungan harus ditujukan dan disetujui oleh Kantor Operasi Penegakan. Wawancara kepada saksi-narapidana oleh Penuntut Umum atau Badan Investigasi harus dilakukan di lembaga dimana dia telah ditempatkan dan dengan persetujuan Kantor Operasi Penegakan. Permohonan harus diajukan 5 hari kerja sebelumnya dan harus memuat hal-hal seperti: tujuan, tanggal, perkiraan waktu yang dibutuhkan, nama orang yang bisa dihubungi (selain pemohon sendiri), dan juga nama setiap orang dari Kantor Jaksa AS atau Badan Investigasi- yang akan menghadiri wawancara itu.

Kehadiran Saksi di Daerah Berbahaya untuk Pemeriksaan Setempat

Permohonan, agar saksi yang telah dipindahkan hadir pada wawancara dan konferensi prasidang dalam kasus dimana saksi bersangkutan diikutsertakan dalam Program Keamanan Saksi, harus dibuat dan disampaikan oleh Penuntut Umum kepada Inspektur Keamanan Saksi dari Kantor US Marshals di wilayah hukum Penuntut Umum. Permohonan ini disampaikan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum tanggal kehadiran yang dimohonkan. Permohonan tersebut harus memuat hal-hal seperti : tujuan, tanggal/waktu, tempat, perkiraan waktu, dan jika memungkinkan, nama yang bisa dihubungi (jika ada selain pemohon).

Permohonan untuk mewawancarai saksi yang telah dipindahkan untuk kasus selain kasus-kasus di bawah lingkup Program dibuat dan diajukan oleh Badan Investigasi melalui saluran resmi yang dimilikinya untuk mendapatkan persetujuan Kantor Operasi Penegakan. Permohonan itu harus memuat: tujuan, tanggal, perkiraan waktu, dan jika memungkinkan, orang yang akan menghadiri selain pemohon. Kantor Operasi Penegakan akan mengirimkan berkas permohonan yang sudah disetujui ke Kantor Marsekal AS atau Biro Tahanan (tergantung mana yang cocok).

Komunikasi harus dialamatkan kepada Ketua Unit Kemanan Saksi, Kantor Operasi Penegakan. Dalam keadaan darurat, dapat juga menghubungi Kantor Operasi Penegakan lewat telepon. Akan tetapi, untuk tidak terlalu mengganggu sumberdaya personil di Kantor US Marshals, panggilan darurat harus sedapat mungkin dihindari. Penuntut Umum atau Badan Investigasi akan diminta mengadakan konferensi atau mewawancarai saksi yang sudah dipindahkan di tempat-tempat netral. Sedang untuk saksi-narapidana, dilakukan di fasilitas Bureau of Prison dimana narapidana bersangkutan ditempatkan.

Dengan demikian, bantuan tenaga dari Kantor US Marshals tidak terlalu dibutuhkan. Kantor US Marshals akan menentukan tempat-tempat netral untuk mewawancarai saksi yang dipindahkan, dan akan secara langsung berkomunikasi dengan pemohon. Penuntut Umum atau Badan Investigasi bertanggungjawab untuk menjamin bahwa kehadiran saksi di daerah berbahaya tersebut haruslah benar-benar memberi hasil yang maksimal. Karena alasan keamanan dan membatasi biaya yang dikeluarkan, saksi tersebut harus sedapat mungkin segera dikembalikan ke tempat pemindahan atau fasilitas Bureau of Prison yang ditentukan.

Bekas Saksi yang Dilindungi sebagai Informan.

Saksi yang telah mengikuti Program Keamanan Saksi tetap memiliki hubungan dengan Departemen Kehakiman. Bahkan setelah berakhirnya tunjangan subsistensi dan dukungan lainnya, hubungan tetap dilakukan dengan Departemen Kehakiman. Namun Hubungan badan-badan investigasi atau Jaksa ini bersifat terbatas untuk tujuan investigasi atau untuk kasus-kasus baru.

Diperlukan suatu persetujuan dari Kantor Operasi Penegakan untuk mengikutsertakan sebagai informan orang-orang dalam kategori berikut: saksi yang sedang dilindungi, setiap orang yang dipindahkan bersama seorang saksi yang bekerjasama, atau seorang bekas saksi yang dilindungi. Informasi yang harus disampaikan ke Kantor Operasi Penegakan untuk dipakai dalam menilai permohonan mengikutsertakan sebagai informan atau seseorang yang telah menerima berbagai layanan dalam Program dapat ditemukan dalam Buku Pegangan Kriminal bagian 702.

Setelah dikabulkannya permohonan untuk mengikutsertakan seorang saksi yang masih di dalam Program sebagai informan, Kantor Operasi Penegakan mengharuskan adanya laporan tentang status saksi tersebut pertama kali setelah 45 hari dan, selanjutnya, setiap tiga bulan selama masih diikutsertakan. Pada umumnya, laporan status seperti ini tidak diperlukan untuk saksi-saksi yang tidak lagi berada di bawah Program. Sedang untuk kasus yang berhubungan dengan pengawasan lewat video dan atau pengawasan yang disepakati harus tunduk pada Undang-undang tentang Pengawasan elektronik.

Larangan Pembayaran Ganda

Setiap kali seorang saksi yang dilindungi hadir ke persidangan, konferensi pra-sidang, atau daerah berbahaya yang disetujui Kantor Operasi Penegakan, Kantor Marsekal AS diberi wewenang untuk menyediakan pembiayaan dan penginapan. Kantor Marsekal AS juga berwenang membayar ongkos perjalanan dan pembiayaan terkait lainnya. Jaksa dilarang membayarkan uang kepada Saksi Fakta yang berada dalam perlindungan dan pembiayaan Kantor Marsekal AS. (Saksi yang secara sukarela menarik diri dari Program Keamanan Saksi dikecualikan dari larangan ini.)⁸

Pembayaran Uang Penghargaan

Kantor Operasi Penegakan harus diberitahu tentang setiap pembayaran uang penghargaan bagi peserta Program Keamanan Saksi. Kantor pusat badan investigasi bersangkutan harus menyampaikan laporan tertulis tentang pembayaran semacam itu. Dalam laporan itu tertera alasan pembayaran itu dan bukti bahwa Jaksa yang menangani perkara menyetujui pembayarannya. Sedang pembayaran bagi saksi yang dilindungi harus dikirimkan kepada Ketua

⁸ Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh badan atau divisi investigasi bagi saksi dan tanggungannya sebelum saksi tersebut diikutsertakan dalam Program Keamanan Saksi dan dipilih oleh Kantor US Marshals menjadi tanggungjawab badan atau divisi bersangkutan.

Prosedur Pemberian Perlindungan Saksi di Amerika Serikat

Program Keamanan Saksi, Divisi Keamanan Judicial, Kantor US Marshals, Kesatuan Angkatan Darat/Laut 600, Arlington, Virginia 22202-4210. Pembayaran bagi narapidana harus dikirim ke Asisten Administrator, Bagian Monitoring Tahanan, Biro Tahanan, 320 First Street, N.W., Room 524, Washington, D.C. 20534.

Pengamanan Khusus

Semua dokumen menyangkut saksi yang dilindungi atau seseorang yang dicalonkan untuk dilindungi harus mendapat penanganan khusus hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa informasi itu hanya akan dibuka berdasarkan alasan yang jelas. Semua dokumen mesti mendapatkan cap keamanan Bahan Investigasi Sensitif. Semua bahan persidangan menyangkut peserta Program Keamanan Saksi seperti tentang proses litigasi narapidana, perlindungan anak, dll harus disegel.

Tempat pemindahan hanya boleh diketahui oleh Kantor Marsekal AS dan tidak boleh diketahui oleh Jaksa yang menangani perkara atau badan investigasi atau para stafnya. Semua kontak dengan saksi harus dilakukan melalui Kantor Operasi Penegakan atau Inspektur Keamanan Saksi dari Kantor Marsekal AS. Saksi bersangkutan juga harus diperintahkan untuk merahasiakan tempat pemindahannya dan hal-hal lain yang terkait. Semua komunikasi tentang saksi yang dilindungi pada saat di luar jam kerja, week-end, dan hari libur pertama-tama harus ditujukan kepada pejabat Kantor Operasi Penegakan yang bertugas, melalui Pusat Komando Keadilan.

Permohonan-Permohonan Lain

Semua permintaan akan informasi tentang aspek apa saja dari Program Keamanan Saksi mesti ditangani sebagai berikut:

- A. Permohonan dari anggota Kongres atau stafnya harus disampaikan kepada Kantor Urusan Legislatif, Departemen Kehakiman dan selanjutnya akan dikirim ke Kantor Operasi Penegakan untuk diproses;
- B. Permohonan dari media massa dan masyarakat harus disampaikan kepada Kantor Urusan Masyarakat, Departemen Kehakiman;
- C. Permohonan lain yang belum disebutkan di atas harus langsung disampaikan ke Kantor Operasi Penegakan.

Tanggungjawab untuk Keberlangsungan Perlindungan

Begitu diterima ke dalam Program Keamanan Saksi, bahkan bila tidak lagi di dalam Program, seorang saksi akan mendapatkan perlindungan di dalam ruang sidang saat ia bersaksi untuk kasus-kasus mana ia diikutsertakan dalam Program. Bila saksi tidak lagi di bawah Program, tetapi tinggal di tempat yang dianggap tidak berbahaya baginya, Kantor Marsekal AS dapat juga memperbolehkan mereka untuk bersaksi. Akan tetapi, jika jelas-jelas terbukti bahwa saksi yang telah mengundurkan diri dari Program berada dalam bahaya mendesak yang disebabkan oleh keterlibatan sebelumnya yang bukan karena kesalahan saksi sendiri, kelanjutan layanan perlindungan baginya akan dipertimbangkan, dan bila dianggap pantas akan dilaksanakan.

Hasil Kesaksian dari Saksi

Kantor Operasi Penegakan bertanggungjawab mengumpulkan dan memelihara kesaksian yang diberikan oleh saksi yang dilindungi. Maka, perlulah Penuntut Umum menyampaikan kepada Kantor Operasi Penegakan segera setelah tersedia informasi berikut:

- A. Nama saksi;
- B. Nama kasus;
- C. Yurisdiksi;
- D. Apakah saksi menyampaikan kesaksiannya di hadapan dewan juri? di sidang? Jika ya, cantumkan tanggalnya. Jika ia tidak bersaksi, jelaskan alasannya.
- E. Kedudukan saksi dalam kasus bersangkutan (tanggungan, yang turut serta, narapidana, korban, atau lainnya);
- F. Nama-nama terdakwa;
- G. Pasal yang didakwakan;
- H. Tanggal dakwaan;
- I. Tanggal dinyatakan bersalah;
- J. Keputusan kasus itu bagi masing-masing terdakwa;
- K. Jika bersalah, rincian tentang hukuman yang dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa termasuk denda, restitusi, dll.;
- L. Informasi apakah ada peristiwa penting dalam hal harta yang diperoleh atau lepas karena bantuan saksi; dan
- M. Informasi apakah ada bantuan saksi terhadap upaya penegakan hukum secara umum di tingkat Federal, Negara Bagian, dan/atau lokal di distrik atau dimana saja. Misalnya dalam hal mengungkap kemungkinan penyebab kejahatan di bawah Judul III, mencari tempat-tempat pelarian.

Tanpa kerjasama Penuntut Umum dalam menyusun informasi ini mustahillah memperlihatkan (lewat statistik) uraian kasus posisi singkat pentingnya Program Keamanan Saksi untuk suksesnya persidangan kasus-kasus penting. Kongres sangat berminat mendapatkan statistik tentang efektivitas Program ini. Informasi ini akan dipakai oleh Kongres untuk menetapkan jumlah dana dan untuk menentukan keberlangsungan dan keberadaan jangka panjang Program.

Dana Kompensasi Korban

Sesuai ketentuan Judul 18 Kitab Pidana AS bagian 3525, Dana Kompensasi Korban telah dibentuk untuk memberi ganti rugi kepada korban kejahatan tertentu. Umumnya, dana ini (sebanyak yang diperbolehkan peraturan yang ada) akan dipakai untuk membayar biaya pengobatan dan/atau penguburan dan pendapatan yang hilang yang tidak dapat diperoleh dari sumber lain. Kepada Kantor Operasi Penegakan telah diberikan wewenang untuk mengatur pengelolaan dana ini dan harus dihubungi bila ada yang membutuhkan informasi tentang dana itu atau ada klaim pembayaran.